



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) | Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

[SIARAN PERS]

Nomor: 035/RILIS/BKN/X/2021

Jakarta, 16 Oktober 2021

### **Pemutakhiran Data Mandiri Diperpanjang Hingga 31 Oktober 2021 bagi 60 Instansi Pusat dan 86 Instansi Daerah**

Menindaklanjuti permohonan perpanjangan usul Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan PPT Non-ASN Tahun 2021 dari 60 instansi pemerintah pusat dan 86 instansi daerah (data terlampir), Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian menetapkan perpanjangan pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri sampai dengan 31 Oktober 2021. Keputusan perpanjangan ini disampaikan melalui Surat BKN Nomor 12998/B-SI.01.01/SD/EIII/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Instansi diharapkan dapat memaksimalkan perpanjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses pengusulan Pemutakhiran Data Mandiri. Untuk mengajukan usul Pemutakhiran Data Mandiri, ASN dan PPT Non-ASN melakukan akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dengan menggunakan *username* dan *password* dan memilih menu *Update Data Mandiri* pada *website* <https://mysapk.bkn.go.id/> untuk melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri. Jika *email* yang digunakan tidak sesuai maka pengguna dapat menghubungi instansi untuk dapat dilakukan perbaikan *email*.

Selanjutnya pengguna dapat memverifikasi dan memvalidasi data pada setiap Riwayat serta mengunggah dokumen pendukung untuk melengkapi Riwayat. Apabila data yang tersimpan saat ini tidak sesuai dengan data terkini. Usul pemutakhiran data untuk setiap riwayat hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir/terkini berikut dengan dokumen pendukung masing-masing kecuali riwayat SKP, riwayat keluarga, dan riwayat CLTN.

Usul pemutakhiran data oleh ASN dan PPT NonASN akan diverifikasi dan disetujui oleh Instansi dan BKN sesuai dengan kewenangan data masing-masing. Apabila data yang diusulkan sesuai dengan dokumen pendukung maka akan dilakukan persetujuan oleh verifikator Instansi dan BKN, sedangkan jika data yang diusulkan tidak sesuai maka akan ditolak oleh verifikator instansi. Seluruh proses pengusulan pemutakhiran data dapat dipantau oleh pengguna melalui aplikasi MySAPK.

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Untuk informasi yang lebih lengkap, ASN dan PPT Non-ASN dapat mengakses informasi pada halaman website <https://pdm-asn.bkn.go.id/> serta dapat mengunduh buku petunjuk *user*, buku petunjuk verifikator, buku saku PDM dan peraturan PDM.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama

Ditandatangani Secara Elektronik

 Satya Pratama





## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021)8093008; Faksimile(021)8090421

Laman:www.bkn.go.id;Pos-el:humas@bkn.go.id

Nomor : 12998/B-SI.01.01/SD/EIII/2021 Jakarta, 14 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan  
Perpanjangan PDM

Kepada

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pusat  
2. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP  
Provinsi/Kabupaten/Kota

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan perpanjangan waktu usul PDM ASN dan PPT Non ASN yang ditujukan kepada Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, bersama ini kami sampaikan bahwa waktu Pemutakhiran Data Mandiri di lingkungan Instansi masing-masing sesuai dengan surat pengajuan (terlampir) akan di perpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.

Adapun Instansi diharapkan dapat memaksimalkan perpanjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses pengusulan Pemutakhiran Data Mandiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian  
Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian  
Informasi Kepegawaian

Ditandatangani secara Elektronik



Soni Sultana, S.Kom, MMSI  
NIP. 197504082000031001



Tembusan, disampaikan Kepada Yth:  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

No	Nama Instansi Pusat
1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
3	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
4	Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional
5	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
7	Badan Tenaga Nuklir Nasional
8	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
9	Kementerian Pertanian
10	Lembaga Ketahanan Nasional RI
11	Badan Narkotika Nasional
12	Kementerian Perdagangan
13	Kementerian Keuangan
14	Sekretariat Kabinet
15	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
17	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
19	Mahkamah Agung RI
20	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
22	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
23	Kementerian Pemuda Dan Olahraga
24	Sekretariat Jenderal DPR RI
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Kementerian ESDM
27	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
28	Kementerian BUMN
29	Badan Kepegawaian Negara
30	Perpustakaan Nasional RI
31	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
32	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
33	Badan Standardisasi Nasional
34	Kementerian Keuangan
35	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
36	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi
37	Kementerian Luar Negeri
38	Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
39	Kementerian Pertahanan
40	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
41	Badan Pusat Statistik
42	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
43	Arsip Nasional Republik Indonesia
44	Setjen WANTANNAS
45	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
46	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
47	Sekretariat Jenderal Komnas Ham RI
48	Kementerian Agama
49	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
50	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
51	Sekretariat Jenderal MPR RI
52	Badan Siber Dan Sandi Negara
53	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
54	Setjen Dewan Perwakilan Daerah
55	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

No	Nama Instansi Pusat
56	Kementerian Komunikasi Dan Informatika
57	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58	Kepolisian Negara Republik Indonesia
59	Ombudsman Republik Indonesia
60	Badan Informasi Geospasial

No	Nama Instansi Daerah
1	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
2	Pemerintah Kota Banjarbaru
3	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
4	Pemerintah Kab. Tasikmalaya
5	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
6	Pemerintah Kab. Bireuen
7	Pemerintah Kota Binjai
8	Pemerintah Kab. Malang
9	Pemerintah Provinsi Bengkulu
10	Pemerintah Provinsi Riau
11	Pemerintah Kab. Kaimana
12	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
13	Pemerintah Kota Banjar
14	Pemerintah Kab. Bangli
15	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
16	Pemerintah Kota Semarang
17	Pemerintah Kota Dumai
18	Pemerintah Kab. Tangerang
19	Pemerintah Kab. Sarmi
20	Pemerintah Kab. Tulungagung
21	Pemerintah Kab. Yahukimo
22	Pemerintah Kab. Asmat
23	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
24	Pemerintah Kota Kediri
25	Pemerintah Kab. Karangasem
26	Pemerintah Kota Tangerang
27	Pemerintah Kota Bitung
28	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
29	Pemerintah Kab. Minahasa Utara
30	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
31	Pemerintah Kab. Muara Enim
32	Pemerintah Kab. Maybrat
33	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
34	Pemerintah Kota Salatiga
35	Pemerintah Kab. Pringsewu
36	Pemerintah Kab. Mempawah
37	Pemerintah Kab. Ketapang
38	Pemerintah Kab. Biak Numfor
39	Pemerintah Kota Padang
40	Pemerintah Kab. Keerom
41	Pemerintah Kab. Sumenep
42	Pemerintah Kota Jayapura
43	Pemerintah Kab. Kendal
44	Pemerintah Kota Batam
45	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
46	Pemerintah Kota Tual
47	Pemerintah Kab. Sukamara
48	Pemerintah Kab. Nias Barat
49	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
50	Pemerintah Kab. Gayo Lues
51	Pemerintah Kab. Supiori

No	Nama Instansi Daerah
52	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
53	Pemerintah Kab. Tasikmalaya
54	Pemerintah Kab. Malang
55	Pemerintah Kab. Merauke
56	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
57	Pemerintah Kota Bukittinggi
58	Pemerintah Kab. Kebumen
59	Pemerintah Kab. Majalengka
60	Pemerintah Kab. Banggai
61	Pemerintah Kota Bandung
62	Pemerintah Kota Magelang
63	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
64	Pemerintah Kab. Grobogan
65	Pemerintah Kab. Yalimo
66	Pemerintah Kab. Kapuas
67	Pemerintah Kab. Garut
68	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
69	Pemerintah Kab. Seruyan
70	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
71	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
72	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
73	Pemerintah Kab. Mappi
74	Pemerintah Kab. Boven Digoel
75	Pemerintah Kota Yogyakarta
76	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
77	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
78	Pemerintah Provinsi Papua
79	Pemerintah Kab. Lamandau
80	Pemerintah Kab. Pulau Morotai
81	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
82	Pemerintah Kab. Deiyai
83	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
84	Pemerintah Kab. Waropen
85	Pemerintah Kota Yogyakarta
86	Pemerintah Kab. Kapuas